



**LAPORAN KINERJA
BAGIAN ORGANISASI
SETDA KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN
2021**

**Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022**

KATA PENGANTAR

Senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama- sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja maka dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka melaksanakan pembangunan Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022
KEPALA BAGIAN ORGANISASI

Dra. HEVI MAIDA LALY, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197003281993042003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Akuntabilitas juga dapat diterjemahkan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto disusun dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi seluruh instansi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lebih baik lagi.

Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto memperhatikan sasaran kinerja serta indikator kinerja yang tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama, yaitu: Meningkatnya penguatan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan tolak ukur indikator kinerja Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses serta akuntabel dengan kategori minimal baik.

Anggaran Tahun 2021 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 1.724.317.801 dengan program penataan organisasi dengan realisasi anggaran mencapai 91% atau Rp. 1.562.913.120. Dengan hasil

capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto serta bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto umumnya demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada Januari 2022 Sub Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto telah di alihkan ke Jabatan fungsional anlis kebijakan, yang mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas Bagian Organisasi mempunyai fungsi: perumusan bahan perumusan kebijakan Daerah dan mengkoordinasikannya di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dilaksanakan melalui 4 (Empat) misi dengan agenda prioritas pembangunan 3 M/5 M (Mojokerto Maju, Mojokerto Adil, Mojokerto Makmur) / (Mojokerto Cerdas, Mojokerto Sehat, Mojokerto Indah, Mojokerto Aman, Mojokerto Berkah. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu dari 10 unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai dengan hasil perumusan struktur kinerja tahun 2021-2026 mempunyai prioritas mendukung pencapaian Misi kepala daerah terpilih pada misi 3 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan” yang menjadi program prioritas yaitu Reformasi Birokrasi dengan tolak ukur :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi Kategori “B” keatas;
- b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan nilai minimal “BB” keatas;

Sebagaimana maklumat dalam misi 3 terkait dengan tatakelola

pemerintahan yang mempunyai makna wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam membangun perubahan birokrasi menuju Good Governance dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Maka pada periode tahun 2021-2026 Bagian organisasi harus bisa mendukung capaian kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.

Pada tahun 2021 merupakan masa transisi perubahan periode perencanaan dari 2016-2021 dengan periode baru 2021-2026 sekaligus sebagai masa akhir RPJPD. Sesuai dengan dokumen perencanaan yang disusun Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Kabupaten Mojokerto mempunyai tolak ukur yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 mengalami 2 kali perubahan sesuai dengan periode perencanaan daerah. Tolak ukur Bagian Organisasi dalam mendukung kinerja Sekretariat Daerah pada periode 2016-2021 dan 2021-2026 tidak mengalami perubahan, masih seputra mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik. Perbedaan hanya pada orientasi misi yang diampu pada periode 2016-2021 mengampu misi 1 terkait sedangkan pada periode 2021-2026 mendukung pencapaian misi3 dengan tolak ukur Nilai SAKIP dan Nilai RB. Adapun pencapaian kinerja Bagian Organisasi Setdar telah tercapai 99% dengan realisasi anggaran 90%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hal yang sangat penting diperhatikan untuk mencapai tujuan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan pertanggungjawaban kinerja serta hasil-hasil yang telah dicapainya. Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban atas pengelolaan kinerjanya, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) yang berisi tentang pertanggungjawaban kinerja instansi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Penyampaian Laporan Kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk komitmen evaluasi tingkat akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kinerja Bagian Organisasi

Setda Kab. Mojokerto untuk menentukan upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa landasan hukum yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
4. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 61 Tahun 2016 tentang pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja
5. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja

C. Tujuan Penyusunan

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Mojokerto untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

1. Peningkatan akuntabilitas Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindak lanjut tahun berikutnya
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan

D. Gambaran umum

I. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pada tahun anggaran 2021 Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

1. Kedudukan

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh Kepala Bagian sebagai Aparatur Sipil Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati Mojokerto.

2. Tugas Pokok

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah dalam menghimpun, menyusun dan menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan bahan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi kelembagaan, tata laksana dan pendayagunaan aparatur.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
- b) Perumusan bahan pembinaan dan petunjuk teknis peningkatan kinerja pelaksanaan koordinasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja).
- c) Perumusan bahan kebijakan dan pembinaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- d) Perumusan, pengolahan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- e) Perumusan dan pengolahan bahan pembinaan penataan kelembagaan.
- f) Perumusan dan pengolahan bahan pelaksanaan analisis dan formasi jabatan.

- g) Perumusan dan pengolahan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah.
- h) Perumusan pengembangan dan pembinaan pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah.
- i) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- j) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

II. Struktur Organisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto

Struktur organisasi Bagian Organisasi Setda Kab Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, terdiri dari:

1. Kepala Bagian Organisasi ;

a) Sub Bagian Tatalaksana mempunyai tugas :

- 1. Melakukan pemberiaan bantuan ketatalaksanaan kepada seluruh perangkat daerah dan unit kerja.
- 2. Menyusun pedoman kerja dan melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas (TND) bagi perangkat daerah dan unit kerja.
- 3. Menyusun bahan kebijakan tentang pedoman penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 4. Melakukan penelitian dan pendampingan mengenai sistem proses dan prosedur kerja.
- 5. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan Laporan Kinerja Kabupaten.
- 6. Menyusun petunjuk teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Kabupaten Mojokerto.
- 7. Melakukan evaluasi capaian SPM sesuai peraturan yang ditetapkan.

8. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik.
9. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis serta pembinaan pelayanan publik.
10. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
11. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

b) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :

1. Menyusun dan memproses bahan tentang kelembagaan perangkat daerah.
2. Menyusun bahan penyempurnaan, pemantapan dan pengembangan perangkat daerah.
3. Melakukan penelitian dan membuat konsep rencana penyempurnaan dan pemantapan kelembagaan perangkat daerah.
4. Melakukan analisis terhadap susunan perangkat daerah serta tugas dan fungsi perangkat daerah.
5. Menyusun bahan program pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah dan unit kerja.
6. Menyusun dan mengolah bahan pelaksanaan dan pemanfaatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
7. Melakukan kerjasama pemanfaatan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
8. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
9. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur mempunyai tugas :

1. Melakukan administrasi kepegawaian meliputi urusan perencanaan dan pengembangan kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah.
2. Melakukan analisis, mempersiapkan dan mengembangkan konsep budaya kerja bagi aparatur Pemerintah Daerah.

3. Melakukan, memproses dan menganalisis data kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah.
4. Melakukan, memproses dan menyusun petunjuk dan pembinaan pendayagunaan aparatur Pemerintah Daerah.
5. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan.
6. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi.

III. Isu-isu Strategis Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto

Reformasi Birokrasi menjadi isu yang menjadi prioritas seluruh lembaga pemerintah di Indonesia dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam RPJMD 2016-2021 agenda Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam mewujudkan birokrasi yang handal. Arah perubahan dalam reformasi birokrasi yaitu dari kondisi birokrasi yang tidak efektif menuju birokrasi modern mensyaratkan adanya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur. Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issued*) serta isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto di antaranya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor Internal Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh 2 (dua) unsur startegis yaitu unsur kekuatan dan unsur kelemahan yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto.

a. Unsur Kekuatan (*Strength*)

- ✓ Adanya pembagian tugas yang jelas antar subbagian berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mojokerto.
- ✓ Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas.
- ✓ Ketersediaan sumber dana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
- ✓ Ketersediaan sarana komunikasi, transportasi, dan peralatan kerja.

b. **Unsur Kelemahan (*Weakness*)**

- ✓ Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
- ✓ Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata persuratan.
- ✓ Kurang optimalnya koordinasi antar subbag
- ✓ Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM aparatur.
- ✓ Sistem pelaporan yang kurang tepat waktu.
- ✓ Adanya beban kerja yang tidak merata pada setiap subbagian.
- ✓ Penataan kelembagaan belum berjalan optimal.

2. **Faktor Eksternal**

Faktor eksternal Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto juga dipengaruhi oleh 2 (dua) unsur startegis yaitu unsur peluang dan unsur ancaman, karena berada diluar lingkungan Bagian Organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh managemen Bagian Organisasi dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. **Unsur Peluang (*Opportunities*)**

- ✓ Adanya dukungan anggaran dalam APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan prima.
- ✓ Adanya wacana diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.
- ✓ Dukungan teknologi informasi yang semakin cepat.
- ✓ Adanya fasilitasi dan pembinaan intensif dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
- ✓ Dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

b. **Unsur Ancaman (*Threat*)**

- ✓ Masih rendahnya komitmen OPD untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas kinerja.
- ✓ Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik.
- ✓ Kurang tertibnya administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- ✓ Belum maksimalnya fungsi dan kinerja Kelompok Budaya Kerja bagi aparatur pemerintah.
- ✓ Pemanfaatan hasil analisis beban kerja belum maksimal.

- ✓ Pemanfaatan analisis jabatan belum pegawai.
- ✓ Banyaknya acuan pelaksanaan tugas yang overlapping dari pemerintah pusat.
- ✓ Belum maksimalnya penerapan sistem pengawasan internal.

IV. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Bagian Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. UMUM

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten Mojokerto, agar lebih terarah, berhasil guna, dan berdaya guna, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik demi mendukung keberhasilan pembangunan nasional, Bupati Mojokerto telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai tujuannya.

Visi sebagai salah satu komponen Perencanaan Strategis, adalah pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan untuk berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi juga merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Adapun visi Bupati Mojokerto periode 2016-2021 adalah:

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan ”

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) dan ke 7 (tujuh) yaitu :

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

Misi 7 : Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat

Sedangkan pada periode perencanaan 2021-2026 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mendukung pencapaian misi ke 3 (tiga) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang berintegras, akuntabel, bersih dan transparan. Dengan adanya misi tersebut Bagian Organisasi Sekretariat Daerah diharapkan mampu menciptakan suatu sistem pemerintahan yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* demi terciptanya kinerja yang baik dan berkualitas serta SDM yang berkompeten sehingga menghasilkan suatu kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto yang menjadi acuan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto adalah Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan tolak ukur Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP.

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto terkait dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran strategis memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun bagian Organisasi sebagaimana di lampiran perjanjian kinerja tahun 2021 Bagian Organisasi, yaitu : Meningkatnya penguatan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan tolak ukur indikator kinerja Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses serta akuntabel dengan kategori minimal baik.

C. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan berupa regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan maupun petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi. Adapun rumusan kebijakan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi, periode 2016-2021 yaitu :

1. Pembangunan Manajemen perubahan dengan pola mind set budaya kerja menjadi budaya kinerja untuk membangun reformasi birokrasi yang terarah, terukur dan tepat dalam penerapan.
2. Penguatan kualitas kelembagaan melalui perumusan struktur organisasi yang tepat fungsi tepat ukuran, dan *raight man, raight place*.
3. Penguatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui perumusan system penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang akuntabel, transparan efektif dan efisien.
4. Penguatan penataan ketatalaksanaan melalui perumusan peta proses bisnis untuk menciptakan sistem proses dan prosedur kerja yang efektif dan efisien
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kebijakan *one agent one inovation*

D. PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan serta visi dan misi dari instansi pemerintah itu sendiri. Adapun rumusan program Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan penataan organisasi yang meliputi 5 sub kegiatan meliputi :

1. Sub kegiatan pengelolaan kelembagaan
2. Sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana
3. Peningkatan kinerja dan RB
4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana
5. Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Mojokerto, pada tahun 2021 ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Perjanjian kinerja dibuat dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan bertujuan untuk mewujudkan target kinerja yang harusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah. Dalam lampiran perjanjian kinerja Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto Tahun 2021, tertuang Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target pada tahun 2021 sebagai terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. MOJOKERTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase PD dengan nilai penerapan RB minimal baik	100%
		Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	100%
		Persentase peningkatan indeks kualitas pelayanan publik Kabupaten Mojokerto	1,25%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN Rp.	KET
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,	1.790.000.000	APBD
	Kegiatan penataan organisasi	1.790.000.000	APBD
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	475.000.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	185.000.000	APBD
3	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	570.0000	APBD
4	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	410.000.000	APBD
5	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	150.000.000	APBD

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. MOJOKERTO

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penguatan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses serta akuntabel dengan kategori minimal baik	100%

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN Rp.	KET
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.724.317.801	APBD
	Kegiatan penataan organisasi	1.724.317.801	APBD
1	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	458.835.750	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	179.517.800	APBD
3	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisi Jabatan	533.879.251	APBD
4	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	410.000.000	APBD
5	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	142.085.000	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang dibahas dalam bagian ini meliputi capaian kinerja sasaran strategis dan akuntabilitas keuangan. Terkait dengan capaian kinerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto, dipaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal berkaitan dengan capaian tersebut. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bagian Organisasi tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah disampaikan dalam perjanjian kinerja Bagian Organisasi pada tahun 2021 beserta realisasinya. Tingkat capaian kinerja Bagian Organisasi tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya sebagai berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI
SETDA KAB. MOJOKERTO TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Program
1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase PD dengan nilai penerapan RB minimal baik	100%	87%	87%
		Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	100%	100 %	100 %
		Persentase peningkatan indeks kualitas pelayanan publik Kabupaten Mojokerto	1,25%	1,05 %	85 %
2	Meningkatnya penguatan penerapan	Persentase PD/UKPD dengan struktur	100%	100%	100%

	Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses serta akuntabel dengan kategori minimal baik			
--	--	---	--	--	--

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				2019	2020	2021
1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase PD dengan nilai penerapan RB minimal baik	100 %	0	0	87%
		Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase peningkatan indeks kualitas pelayanan publik Kabupaten Mojokerto	85 %	-	-	85 %
2	Meningkatnya penguatan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%

		serta akuntabel dengan kategori minimal baik				
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode RPJMD/RENSTRA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase PD dengan nilai penerapan RB minimal baik	100%	100%	100%
		Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan indeks kualitas pelayanan publik Kabupaten Mojokerto	1,25%	1,25%	100%
2	Meningkatnya penguatan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	100%	100%	100%

		serta akuntabel dengan kategori minimal baik			
--	--	--	--	--	--

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2021	Realisasi Nasional	Ket (- / +)
1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase PD dengan nilai penerapan RB minimal baik	100%	-	
		Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses	100%	-	
		Persentase peningkatan indeks kualitas pelayanan publik Kabupaten Mojokerto	1,25%	-	
2	Meningkatnya penguatan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Persentase PD/UKPD dengan struktur kelembagaan dan tatalaksana yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses serta akuntabel dengan kategori minimal baik	100%	-	

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- 3.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan realisasi capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2021 sebesar 56 PD/UKPD dengan tingkat realisasi 100% dan perkiraan capaian target Renstra tahun 2022 sebesar 100%. Dalam pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan anjab meliputi penataan struktur organisasi hasil penyederhanaan birokrasi dengan imbas penyetaraan jabatan eselon IV menjadi fungsional dan eselon III di DPMPTSP. Dan Penyusunan anjab /ABK tahun 2021 sesuai dengan struktur organisasi sesuai dengan penetapan Perda 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda 9 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Harapannya target 2022 dengan tolak ukur jumlah PD/UKPD dengan struktur organisasi kelembagaan tepat fungsi tepat ukuran yang ditargetkan 57 PD/UKPD dapat tercapai 100%.
- 3.2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana realisasi capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2021 sebesar 56 PD/UKPD dengan tingkat realisasi 100% dan perkiraan capaian target Renstra tahun 2022 sebesar 100%. Pencapaian kinerja tahun 2021 sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana diantaranya pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat, evaluasi kepatuhan terhadap Standar pelayanan bersama ombudsman, dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021. Prestasi Tahun 2021 Kabupaten Mojokerto terkait inovasi adalah masuk sebagai inovasi 10 terbaik Tk Propinsi Jawa Timur dengan judul inovasi Permen Si Mela inovasi dari Puskesmas Bangsal.
- 3.3. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi realisasi capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2021 sebesar 57 PD/UKPD dengan tingkat realisasi 100% dan perkiraan capaian target Renstra tahun 2022 sebesar 100%. Sub kegiatan peningkatan kinerja RB dilaksanakan dengan rincian kegiatan berupa pembinaan SAKIP dengan metode bimtek dan Pra evaluasi SAKIP perangkat Daerah. Sedangkan Penerapan RB dengan pembinaan Rb dan Penilaian/evaluasi RB dengan metode Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi SAKIP dan RB Tk Pemda tahun 2021 oleh Kementerian PAN dan RB masih dalam proses penilaian

tim panel Kementerian PAN dan RB.

- 3.4. Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana realisasi capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2021 sebesar 56 PD/UKPD dengan tingkat realisasi 100% dan perkiraan capaian target Renstra tahun 2022 sebesar 100%. Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi pelaksanaan evaluasi SOP, Penyusunan SKM dan pelaksanaan partisipasi pameran publik di Propinsi Jatim.
- 3.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah realisasi capaian kinerja pelaksanaan Renja tahun 2021 sebesar 57 PD/UKPD dengan tingkat realisasi 100% dan perkiraan capaian target Renstra tahun 2022 sebesar 100%. Sub kegiatan ini meliputi fasilitas penyusunan PK perangkat daerah dan Pemda 2021. Laporan kinerja Pemda sebagai bagian dari LPPD disusun pada Bulan Januari s/d maret 2021 sedangkan PK Pemda disusun pada APBD indik 2021 dan APBD perubahan 2021. Di Tagun 2021 PK Pemda disusun 3 kali saat ada perubahan Kepala Daerah periode 2021-2026.

- Keberhasilan pencapaian kinerja Bagian Organisasi didukung dengan aktivitas rincian kegiatan untuk mendukung pencapaian targetnya, diantaranya :

1. Penyusunan Laporan Kinerja (Laporan Kinerja) Pemda
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemda
3. Fasilitasi penerapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
4. Fasilitas Penerapan Aplikasi SAKIP
5. Evaluasi penerapan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi

1. Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran sesuai ketentuan

- Pada indikator kinerja ini terdapat beberapa kegiatan dalam rangka mencapai targetnya, meliputi :

1. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab)
2. Penyusunan Analisis Baban Kerja (ABK)

3. Penyusunan Standart Kompetensi Jabatan
4. Evaluasi Jabatan
5. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
6. Pembinaan Budaya Kinerja
7. Evaluasi dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
8. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan Inovasi Unit Pelayanan Publik
9. Evaluasi Penerapan SMM ISO 9001;2015
10. Fasilitasi dalam rangka gelar pameran inovasi pelayanan publik
11. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standarisasi pelayanan

C. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik khususnya dalam bidang pemerintahan harus didukung dengan adanya anggaran yang memadai dan sapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut ini merupakan penggunaan sumber daya keuangan Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto :

Tabel 3.5
Alokasi Sasaran Per Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan SAKIP sesuai ketentuan	Rp 1.724.317.801	100%
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran sesuai ketentuan		
		Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan		

		reformasi birokrasi		
2	Meningkatnya kualitas sistem pelayanan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan	Persentase penyelenggara pelayanan dengan nilai IKM minimal kategori Baik		

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase PD dengan nilai penerapan RB minimal baik	100%	100%	100%	Rp 1.724.317.801	Rp 1.562.913.120	91%
	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran sesuai ketentuan	100%	100%	100%			
	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan reformasi birokrasi	1,25%	100%	100%			
Meningkatnya penguatan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Persentase peningkatan indeks kualitas pelayanan publik Kabupaten Mojokerto	100%	100%	100%			

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Persentase PD dengan nilai penerapan RB minimal baik	100%	91%	9%
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran sesuai ketentuan	100%		
		Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan reformasi birokrasi	100%		
2	Meningkatnya penguatan penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto	Persentase peningkatan indeks kualitas pelayanan publik Kabupaten Mojokerto	100%		

D. REALISASI ANGGARAN

Sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto, untuk mendorong pencapaian

Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mojokerto mengelola anggaran anggaran belanja dengan sumber dana dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 0
 Belanja Langsung : Rp. **1.724.317.801**
 - Belanja Pegawai : Rp. 0
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. **1.724.317.801**
 - Belanja Modal : Rp. 0

Jumlah Seluruh Anggaran Belanja **Rp. 1.724.317.801**

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto 2021

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	458.835.750	Rp 420.583.550	92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	179.517.800	Rp 142.315.125	79%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisa Jabatan	533.879.251	Rp 480.673.165	88
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	410.000.000	Rp 379.596.730	96%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	142.085.000	Rp 139.744.550	96%

E. Prestasi Tahun 2021

Prestasi yang didapat oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto tahun 2019 adalah dalam rangka pembinaan inovasi pelayanan publik UPT Puskesmas Bangsal dalam Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Tingkat Provinsi Jawa Timur dan WBK untuk Kecamatan Puri.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bagian Organisasi dalam rangka melaksanakan berbagai kewajiban untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan melaksanakan tugas pemerintahan.

Pada tahun 2021, Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto menetapkan 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang merupakan gambaran dari tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan. Mengacu pada 1 sasaran dan 1 indikator kinerja utama, realisasi seluruh sasaran dan indikator sasaran telah memenuhi target yang telah ditentukan.

B. SARAN

Demi tercapainya sasaran organisasi dan perbaikan di tahun yang akan datang, Bagian Organisasi perlu melakukan perbaikan-perbaikan antara lain :

1. Mengupayakan efisiensi/penghematan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang dapat ditekan anggarannya
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan kegiatan dan kebutuhan instansi serta jumlah Pegawai di Bagian Organisasi Setda Kab. Mojokerto